

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting bagi kesejahteraan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga masyarakat mampu menjalani kehidupan dengan baik. Masyarakat dengan kualitas hidup yang baik, pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai serta pendapatan masyarakat per kapita yang sesuai akan meningkatkan produktivitas pembangunan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan wilayah bersangkutan. PDRB menjadi tolak ukur pendapatan dan kesejahteraan suatu daerah. Secara umum, kesejahteraan mengacu pada kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi (Patel *et al*, 2012).

Salah satu dimensi yang mendasari kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah adalah kesetaraan gender. Menurut Widayanti *et al* (2013) kesetaraan gender perempuan dan laki-laki merupakan pondasi utama dalam pembangunan manusia. Pencapaian yang merata, adil antar generasi, suku dan jenis kelamin merupakan hal penting dalam proses pembangunan (Aktaria & Handoko, 2012). Pembangunan dalam segala aspek untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia baik perempuan maupun laki-laki berprinsip pada kesetaraan gender.

Menurut KPPPA (2019) hal ini merupakan tujuan kelima dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai daya saing dari suatu negara yaitu kualitas sumber daya manusia, baik ditinjau dari segi kemampuan, keterampilan, ataupun produktivitasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk membangun kualitas dan sumber daya manusia seluruh penduduk tanpa harus memandang ketidaksamaan jenis kelamin (Indrasetianingsih *et al*, 2021). Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai urgensi dalam pembangunan manusia.

Terdapat beberapa ukuran atau indikator yang dapat digunakan untuk memperhitungkan sejauh mana kesetaraan atau kesenjangan pembangunan manusia berbasis gender di suatu negara atau daerah, salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pembangunan Gender merupakan perolehan keahlian dasar pembangunan manusia dengan memerhatikan ketimpangan gender (Budiantara & Fajriyah, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPG adalah perbandingan atau rasio capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan.

Diskriminasi gender menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan atau disebut dengan ketimpangan gender. *Gender Inequality Index* (GII) atau indeks ketimpangan gender memperlihatkan adanya kemusnahan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan oleh munculnya kesenjangan gender. Kesenjangan terjadi disebabkan adanya diskriminasi dari berbagai lini seperti

pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Di berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia, ketimpangan ini diperkuat dengan budaya *patriarki* yang lebih memprioritaskan laki-laki dibanding perempuan. Posisi laki-laki sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peran publik, sedangkan perempuan hanya berfokus terhadap peran domestik (Wisnujati, 2020). Perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang melekat pada gender mampu dilihat dari kecenderungan peran masing-masing secara publik maupun domestik.

Kesetaraan gender akan memacu kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi dimulai dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari skala mikro hingga makro pada suatu negara. Di Indonesia, pembangunan ekonomi dimulai dari pertumbuhan ekonomi dari provinsi-provinsi. Provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi, pendapatan yang merata dan terjaminnya kesejahteraan dari segala aspek kehidupan akan menjadikan indeks pembangunan manusianya tinggi. Selain indeks pembangunan manusia yang tinggi ada pula indeks pembangunan gender yang berjalan berdampingan. Rata-rata indeks pembangunan manusia yang tinggi terdapat di pulau Jawa, hal itu disebabkan karena pulau Jawa sebagai sentral perekonomian dan pemerintahan di Indonesia dengan Jakarta sebagai ibukota negara serta kepadatan penduduk yang tinggi.

Agar capaian pembangunan suatu wilayah terwujud dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dibutuhkan pendidikan yang memadai. Dalam upaya ini, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk menempuh pendidikan minimal 12 tahun. Pemerintah juga menghadirkan program dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan-bantuan lain melalui anggaran APBN sehingga masyarakat tidak perlu membayar iuran pendidikan dengan begitu semua kalangan dapat bersekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi pengukuran dalam perhitungan lama pendidikan seseorang. Rata-rata lama sekolah diartikan jumlah tahun belajar. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas diri. Perempuan memungkinkan mengurangi beban kemiskinan, namun perbaikan peran dan status melalui pendidikan mampu memutus *stigma* tersebut (Aktaria & Handoko, 2012).

Kesehatan juga menjadi bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan produksi atau output yang dicapai suatu wilayah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata dari jumlah tahun seseorang dapat hidup dalam seumur hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai usia yang dapat dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup mencerminkan taraf kesehatan suatu wilayah yang menjadi dampak dari pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan (Laksono, 2013). Pelayanan kesehatan yang layak akan mendorong laju produktivitas ekonomi. Perempuan yang sehat secara jasmani dan rohani mampu melakukan kegiatan maupun pekerjaan secara baik, tekun dan ulet. Pada dasarnya perempuan lebih banyak melakukan kegiatan, mulai dari mengurus rumah bahkan bekerja. Oleh karena itu, perempuan sehat, kuat yang berada dalam umur produktif akan mendorong laju pertumbuhan dengan baik.

Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Gender akan dilimpahkan kepada setiap daerah otonom di Indonesia. Penerapan otonomi daerah bertujuan

untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat lalu diikuti Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang terbagi ke dalam Karesidenan. Karesidenan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kabupaten atau kota, salah satunya adalah Karesidenan Semarang. Karesidenan Semarang terdiri dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal.

Berikut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di wilayah Karesidenan Semarang dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Wilayah Karesidenan Semarang Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

| Wilayah | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kota Semarang | 115.542.56 | 123.279.89 | 131.266.36 | 140.209.33 | 137.951.30 |
| Kota Salatiga | 8.168.24 | 8.624.24 | 9.127.85 | 9.666.00 | 9.503.16 |
| Kab. Semarang | 30.292.46 | 33.002.98 | 33.817.67 | 35.939.31 | 34.687.62 |
| Kab. Kendal | 26.139.41 | 27.649.77 | 29.245.66 | 30.916.38 | 30.443.68 |
| Kab. Demak | 15.672.48 | 16.584.12 | 17.479.88 | 18.417.01 | 18.374.56 |
| Kab. Grobogan | 16.682.63 | 17.659.25 | 18.688.57 | 19.692.63 | 19.379.684 |

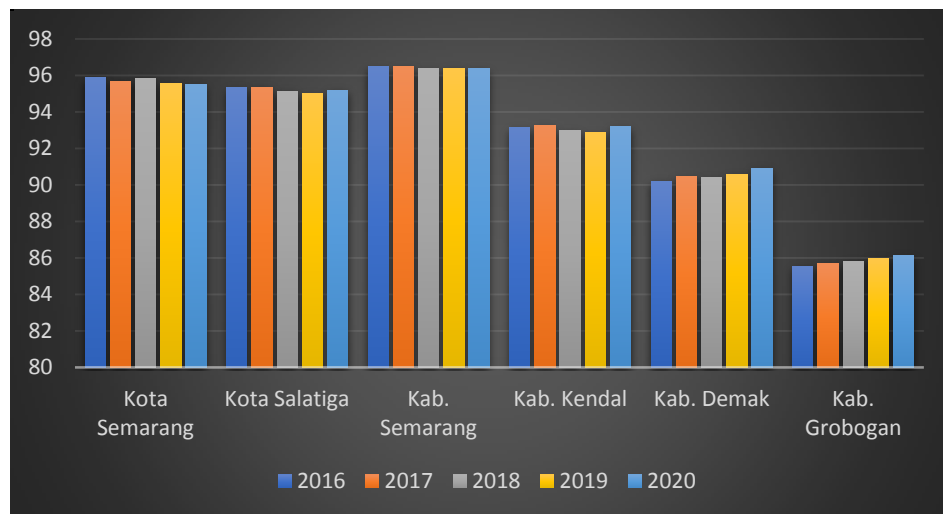
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Karesidenan Semarang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Fluktuasi ini disebabkan pertambahan komoditas di berbagai sektor. Sektor industri, sektor pertanian dan pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB di wilayah Karesidenan Semarang. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal rata-rata

pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan dari tahun 2016 lalu turun di tahun 2020 akibat pandemi. Meski begitu, setiap kabupaten terus berbenah agar PDRB masing-masing wilayah terus naik. Program pemerintah dan pembangunan digencarkan agar produktivitas tercapai maksimal.

Pada lima tahun terakhir, Kota Semarang menduduki angka tertinggi rata-rata perhitungan produk domestik regional bruto atas harga konstan. Sebagai sentral pemerintahan, Kota Semarang juga merupakan wilayah dengan jumlah terbanyak industri-industri besar sehingga penyerapan tenaga kerja mampu terserap maksimal. Kota Semarang merupakan kota terpadat setelah Kota Solo dengan UMK tertinggi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kesejahteraan di Kota Semarang tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu, PDRB terendah dimiliki Kota Salatiga. Meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Salatiga selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, namun Kota Salatiga merupakan kota kecil dengan penduduk berjumlah 192.322 pada tahun 2020 sehingga pendapatan daerahnya cenderung rendah. Menurut Solopos pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga mengalami minus hingga 1,68% akibat pandemi, sedangkan tingkat kemiskinannya berada di angka 4,94% terendah di Jawa Tengah dan tingkat pengangguran di Kota Salatiga relatif rendah.

Dalam pembangunan ekonomi di wilayah Karesidenan Semarang kontribusi perempuan juga dibutuhkan untuk memaksimalkan produktivitas. Indeks Pembangunan Gender (IPG) di wilayah Karesidenan Semarang dapat dilihat pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1 Indeks Pembangunan Gender Wilayah Karesidenan Semarang (Angka Indeks)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan Grafik 1.1, diketahui bahwa selama lima tahun terakhir indeks pembangunan gender mengalami fluktuasi di berbagai wilayah Karesidenan Semarang dan cenderung turun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan fluktuasi yang terjadi dengan berjalannya waktu meningkatkan capaian pembangunan manusia, peran perempuan semakin bertambah dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan perempuan di wilayah Karesidenan Semarang. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan rata-rata tertinggi terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Angka indeks tinggi mampu dicapai dengan adanya dukungan dari pemerintah serta peran perempuan yang aktif mengikuti program yang diadakan pemerintah. Salah satu program pemerintah Kabupaten Semarang yaitu Sekolah Wirausaha. Manfaat pelatihan diharapkan membangkitkan peran

perempuan dalam ekonomi melalui wirausaha. Namun demikian, perlu upaya maksimal agar kesetaraan terwujud secara nyata.

Rata-rata angka IPG terendah terjadi pada wilayah Kabupaten Grobogan. Pembangunan gender belum sepenuhnya menjadi program prioritas pemerintah Kabupaten Grobogan. Menurut Badan Pusat Statistik dalam Kebijakan Umum dan Program Pembangunan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa pemerintah lebih menekankan terhadap pembangunan infrastruktur, pemberian jaminan kredit UMKM, peningkatan pelayanan kesehatan, dan program wajib belajar 12 tahun secara gratis serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru di pedesaan.

Indeks pembangunan gender memiliki beberapa komponen, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (BPS, 2021). Apabila semakin rendah jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin seimbang pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin tinggi ketidaksamaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 menunjukkan rasio perbandingan paling sempurna (BPS, 2021).

Dari latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Perempuan Terhadap Perekonomian di Wilayah Karesidenan Semarang tahun 2016 hingga 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar kontribusi perempuan terhadap perekonomian di wilayah Karesidenan Semarang. Penelitian ini menggunakan

data panel dengan pengamatan pada 6 kabupaten atau kota selama kurun waktu 5 tahun.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau Kota wilayah Karesidenan Semarang tahun 2016-2020?

C. Tujuan Masalah

Mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten atau Kota wilayah Karesidenan Semarang tahun 2016-2020.

D. Manfaat Penelitian

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan upaya peningkatan kesetaraan gender perempuan bagi pembangunan ekonomi.

Bagi para peneliti dan literatur, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan atau pustaka dan bahan bacaan mengenai kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi wilayah.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah

Perempuan (RLS) terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Karesidenan Semarang dengan menggunakan alat analisis regresi data panel yang merupakan modifikasi dari penelitian Mulasari (2015) dan Padang *et al* (2019). Dengan model ekonometrika seperti berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPG_{it} + \beta_2 AHH_{it} + \beta_3 RLS_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| PDRB | = Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah) |
| IPG | = Indeks Pembangunan Gender (angka indeks) |
| AHH | = Angka Harapan Hidup Perempuan (tahun) |
| RLS | = Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (tahun) |
| ε | = <i>Error term</i> (faktor kesalahan) |
| β_0 | = Konstanta |
| $\beta_1 \dots \beta_3$ | = Koefisien regresi variabel independen |
| i | = Observasi ke i |
| t | = tahun ke t |

E.2 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 2016 hingga 2020, yang meliputi Indeks Pembangunan Gender (IPG), Angka Harapan Hidup Perempuan (AHH), dan Rata-rata Lama Sekolah Perempuan (RLS). Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Nasional.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang berisikan 1.) alat dan model penelitian 2.) data dan sumber data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian, penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan diteliti, hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan alat analisis, model ekonometrika, bentuk data yang akan digunakan dan sumber data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil estimasi yang menyajikan alat, model beserta keterangannya dan diakhiri dengan penyajian hasil estimasinya. Selain hasil estimasi bab ini juga berisikan interpretasi kuantitatif yang menjelaskan makna dari koefisien-koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi, dan yang terakhir berisikan interpretasi ekonomi, didalamnya terdapat peramalan terhadap kondisi dan kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang dapat diambil untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang diramalkan sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis kuantitatif dan analisis ekonomi, kemudian merumuskan saran bagi pihak-pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN